



wonderful
riau islands

RENCANA AKHIR RENJA TAHUN 2025



DINAS PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR

Untuk meningkatkan kualitas koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah sebagai usaha mewujudkan *good governance*, dibutuhkan adanya seperangkat pedoman penyelenggaraan administrasi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, baik secara kelembagaan maupun dalam kegiatan tim kerja.

Melalui program-program yang diusulkan dalam Rencana Organisasi Perangkat Daerah ini, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau bermaksud untuk memaksimalkan langkah kerja secara terpadu antara bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai fungsi, wewenang dan tugas pokok Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Program dan Kegiatan tahun 2025 tentunya masih merupakan mata rantai dari program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya mengingat membangun kepariwisataan tidak bisa dicapai dalam sekali kegiatan namun harus bertahap agar lebih berhasil secara optimal.

Kami sangat berharap program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang disusun dalam Rencana Kerja ini dapat disetujui mengingat pentingnya isu strategis yang dapat diselesaikan melalui Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungannya.

Tanjungpinang,

2024

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau



GUNTUR SAKTI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691208 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	31
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	62
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	67
BAB V PENUTUP.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau.....	11
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.....	30
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.....	37
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau	60
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	65
Tabel 4.1.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Skema Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025.....	63
-------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja tahun 2025 adalah rencana kerja ke-4 dari pelaksanaan rencana strategis dan RPJMD Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Rencana kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, kegiatan, sub kegiatan, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah - langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), di mana kebijakan umum APBD ditetapkan secara Bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan pilihan pariwisata dengan mengacu pada Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian Dinas Pariwisata menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang pariwisata dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun anggaran 2025.

1.2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4);
- 14) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
- 22) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
- 23) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Provinsi Kepulauan Riau;
- 24) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);

- 25) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 903);
- 26) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 951).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan serta menentukan sasaran dengan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan, dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan bidang pariwisata pada tahun 2025.
- b. Melaksanakan pembangunan agar tepat sasaran dan tepat waktu.
- c. Memberikan penetapan alokasi anggaran yang dibutuhkan secara transparan dan akuntabel.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan rencana kerja tahun 2025 adalah pelaksanaan penyusunan rencana kerja ke-4 dari pelaksanaan rencana strategis dan RPJMD Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Dari Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata sampai dengan Tahun 2023 (terlampir) dapat kita lihat bahwa tidak semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi dengan baik. Keterbatasan anggaran dan dinamika perubahan kebijakan dan isu yang terjadi mengakibatkan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan dan mengalami perubahan-perubahan. Namun demikian dari tabel juga dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik.

Realisasi kinerja program yang memenuhi target kinerja hasil ada 4 (empat) program yaitu pada Program Pemasaran Pariwisata pada indikator; Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau, pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada indikator; Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara, Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator; Persentase produk Ekonomi Kreatif Yang Difasilitasi Untuk Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan, dan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator; Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor.

Realisasi kinerja program yang tidak memenuhi target kinerja hasil terdapat 2 (dua) realisasi kinerja program yaitu pada Program Pemasaran Pariwisata yaitu: Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara, dan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada indikator Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara.

Mempedomani skala peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang berkategori kinerja/ status Sangat Tinggi (ST) yaitu; indikator Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara (405,87%), Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (322,81%), Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (189,43%), Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (98,33%), Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau (221,17%), Persentase produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya (115,00%), Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (131,67%) dan Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor (100%).

Selain itu terdapat 1 (satu) realisasi Indikator kinerja Sasaran yang berkategori kinerja/ status Rendah (R) yaitu: Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (87,08%).

Dan terdapat 1 (satu) realisasi Indikator kinerja Sasaran yang berkategori kinerja/ status Rendah (R) yaitu: Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (62,30%).

Menurut analisa kami penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program sampai sejauh ini adalah adanya permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Urusan Pariwisata pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Ada indikator program yang deviasi capaiannya terlalu tinggi bahkan mencapai lebih dari 200% yang disebabkan melesetnya prediksi capaian yang disusun dalam penyusunan RPJMD pada tahun 2021. Pada saat penyusunan RPJMD masih dalam suasana pandemi covid 19 dan dunia pariwisata diprediksi baru mulai bangkit pada tahun 2023, ternyata

perkembangan dunia pariwisata berkembang pesat pada tahun 2023, di luar prediksi bahkan jauh dari prediksi;

4. Terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian Tinggi (T) yaitu Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (87,08), hal ini disebabkan karena banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kepulauan Riau tidak menggunakan fasilitas hotel baik hotel berbintang maupun non bintang;
5. Sementara itu ada satu indikator program yang capaiannya Rendah (R) yaitu pada indikator Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (62,30%) yang diakibatkan oleh masih enggan nya wisatawan untuk bepergian disebabkan tingginya harga tiket pesawat yang mempengaruhi perjalanan wisatawan nusantara ke Kepulauan Riau;
6. Beberapa sub kegiatan mengalami serapan yang rendah dikarenakan selisih SSH yang ditetapkan dalam SIPD terlalu tinggi dibandingkan harga pasar yang mengakibatkan serapan anggaran tidak maksimal.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024 dapat di lihat pada **Tabel 2.1. di bawah:**

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Miliar Rupiah	3.495	6.301,87	2.626	6.301,87	239,98	2.888	2.888	82,63
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,7	2,09	2,4	2,09	87,08	2,5	2,5	92,59
		Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	2,1	1,77	1,8	1,77	98,33	1,9	1,9	90,48
		Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	43	53,45	23,8	52,64	221,17	40	40,00	93,02
3 26 02 1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	Daya Tarik	14	0	0	0	0,00	14	14	100,00
3 26 02 1.01 01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang ditetapkan	Daya Tarik	14	35	0	0	0,00	0	35	250,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 26 02 1.01 02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang rancang dan direncanakan	Daya Tarik	6	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 02 1.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang dikembangkan	Daya Tarik	14	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 02 1.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang dimonitoring dan dievaluasi	Daya Tarik	35	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0,00	1	1	0,00
3 26 02 1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kawasan Strategis	15	3	0	0	0,00	14	17	113,33
3 26 02 1.02 01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang ditetapkan	Kawasan Strategis	18	14	0	0	0,00	0	14	77,78

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 26 02 1.02 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang direncanakan	Kawasan Strategis	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 02 1.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Kawasan Strategis	7	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 02 1.02 04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang diadakan sarana dan prasarannya	Kawasan Strategis	17	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 02 1.02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dimonitoring dan dievaluasi	Kawasan Strategis	90	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 26 02 1.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah orang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Orang	4900	670	0	0	0,00	0	670	13,67
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Destinasi	22	2	7	2	28,57	2	6	27,27
3 26 02 1.03 01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditetapkan	Destinasi	80	2	0	0	0,00	0	2	2,50
3 26 02 1.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang direncanakan	Dokumen	12	0	0	0	0,00	1	1	8,33
3 26 02 1.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Destinasi	4	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Lokasi	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 02 1.03 04	Pengadaan /Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang diadakan /dipelihara/ direhabilitasi Sarana dan Prasarananya	Destinasi	3	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	0	0	3	3	0,00	0	3	0,00
3 26 02 1.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dimonitoring dan dievaluasi	Destinasi	64	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	0	0	1	1	0,00	0	1	0,00
3 26 02 1.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat/orang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Orang	1500	0	500	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	0	0	1	1	0,00	0	1	0,00
3 26 02 1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Industri	50	10	10	10	100,00	10	30	60,00
3 26 02 1.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata	2500	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	0	0	1	1	0,00	1	2	0,00
3 26 02 1.04 05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Standarisasi	Usaha Pariwisata	1100	25	0	0	0,00	0	25	2,27
		Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Standarisasi	Unit Usaha	0	1	0	0	0,00	0	1	0,00
		Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	%	23,06	93,11	22,94	93,11	405,87	22,98	22,98	99,65
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	994.553	558.009	474.240	1.530.899	322,81	607.027	607.027	61,04
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	4.405.414	1.511.354	2.426.092	1.511.354	62,30	2.959.832	2.959.832	67,19
		Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Miliar Rupiah	11.113,50	9.740,7	5.142,1	9.740,7	189,43	6.632,4	6.632,4	59,68
3 26 03 1.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan	Daya Tarik/Destinas i/Kawasan	100	20	40	0	0,00	60	80	80,00
3 26 03 1.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Media	50	75	10	0	0,00	22	97	194,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	0	29	38	131,03	1	39	0,00
3 26 03 1.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata luar negeri	Kota di Luar Negeri	8	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah promosi pariwisata dalam negeri	Kota di dalam Negeri	10	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah stakeholder pariwisata yang diberi insentif	Stakeholder	10	7	0	0	0,00	0	7	70,00
		Jumlah wisata olahraga berstandar internasional yang didukung	Even	11	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	0	0	9	14	155,56	1	15	0,00
26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri yang disediakan	Daya Tarik/Destina si/ Kawasan	20	16	0	0	0,00	0	16	80,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	0	1	1	100,00	0	1	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 26 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri yang ditingkatkan	Kemitraan Pariwisata	15	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 03 1.01 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dimonitoring dan dievaluasi pengembangan pemasarannya	Daya Tarik/kawasan	35	0	7	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	10	2,05	2	2,3	115,00	2	6	63,50
3 26 04 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Usaha Kreatif yang dikembangkan dan disediakan sarana dan prasarannya	Usaha Kreatif	50	10	0	0	0,00	0	10	20,00
3 26 04 1.01 02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Pameran	4	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 04 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah ruang kreasi dan jaringan orang kreatif yang dikembangkan	Orang Kreatif	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 04 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	Usaha Kreatif	440	15	0	0	0,00	0	15	3,41
3 26 04 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah Usaha Kreatif Pemula yang ditingkatkan	Usaha Kreatif	485	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 04 1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Ekosistem	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
3 26 04 1.02 01	Pengembangan Riset	Jumlah Riset yang dikembangkan	Dokumen	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 04 1.02 04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur yang Disediakan	Ruang Kreatif	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 04 1.02 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah media yang digunakan dalam pemasaran produk ekraf	Sistem Pemasaran	5	1	0	0	0,00	0	1	20,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 04 1.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif yang terdaftar HAKI	Usaha Ekonomi Kreatif	11	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	1	1	0,00	1	2	0,00
3 26 04 1.02 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang disusun	Dokumen	2	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 04 1.02 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dimonitoring dan dievaluasi	Ekosistem	5	1	0	0	0,00	0	1	20,00
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	15	1,63	3	3,95	131,67	3	3	20,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 26 05 1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	2748	100	37	82	221,62	37	219	7,97
3 26 05 1.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya	Orang	1200	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata yang ditingkatkan peran sertanya	Kemitraan Pariwisata	100	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 05 1.01 03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Berkas Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang	300	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 05 1.01 04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang difasilitasi sertifikasi kompetensi	Orang	500	100	37	82	221,62	0	182	36,40
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	0	0	0	0	0,00	37	37	0,00
3 26 05 1.01 05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan asesor kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Asesor	33	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 26 05 1.01 06	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Jumlah asesor yang mengikuti pelatihan perpanjangan lisensi Asesor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Asesor	15	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 05 1.01 08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif	200	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 05 1.01 09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Orang	400	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 05 1.01 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dimonitoring dan dievaluasi	Orang	1.250	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0	0,00	1	1	0,00
3 26 05 1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Kapasitasnya	Orang	570	120	0	0	0,00	290	410	71,93
3 26 05 1.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan	Orang	220	70	0	0	0,00	0	70	31,82

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 26 05 1.02 02	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha	Pelaku Ekonomi Kreatif	150	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 05 1.02 03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Usaha Bidang Ekonomi Kreatif yang distandarisasi dan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang disertifikasi Profesi	Orang	200	50	0	0	0,00	0	50	25,00
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah	Dokumen	15	3	2	2	100,00	3	8	53,33
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
3.26.01.1.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	0	0	0,00	1	2	40,00
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	70	14	0	0	0,00	0	14	20,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	47	47	47	100,00	47	141	0,00
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	60	12	0	0	0,00	0	12	20,00
		Jumlah pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	0	12	12	100,00	1	13	0,00
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	5	1	0	0	0,00	0	1	20,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	1	1	100,00	1	1	0,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	%	100	0	0	0	0,00	100	0,00	0,00
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Pemenuhan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Bulan	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Stel	250	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Stel	250	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
3 26 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Bulan	60	12	0	0	0,00	0	12	20,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	3	3	0,00	3	6	0,00
3 26 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	60	12	0	0	0,00	0	12	20,00
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	2	2	0,00	2	4	0,00
3 26 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	60	12	0	0	0,00	0	12	20,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	12	12	0,00	12	24	0,00
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Unit	12	7	13	16	123,08	11	34	283,33
3.26.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan	Unit	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 26 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	12	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	13	16	123,08	11	27	0,00
3 26 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan sewa gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
3 26 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Bulan	60	12	0	0	0,00	0	12	20,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	1	1	100,00	1	2	0,00
3 26 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	12	0	0	0,00	0	12	20,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	1	1	100,00	1	2	0,00
3 26 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	65	13	0	0	0,00	0	13	20,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	1	1	100,00	1	2	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 26 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
3 26 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Bulan	60	12	0	0	0,00	0	12	20,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	2	2	100,00	2	4	0,00
3 26 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	Bulan	60	12	0	0	0,00	0	12	20,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	6	6	100,00	6	12	0,00
3 26 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	60	12	0	0	0,00	0	12	20,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	60	60	100,00	65	125	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
						Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 26 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan gedung kantor	Bulan	12	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Dari Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata sampai dengan Tahun 2023 tidak dapat dilakukan evaluasi pada seluruh kegiatan dan sub kegiatan dikarenakan indikator rencana kerja untuk tahun 2023 merupakan indikator baru sesuai dengan pemutakhiran menurut Kepmendagri 050-5889 sementara renja sebelumnya masih menggunakan rencana kerja berdasarkan indikator lama.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Pariwisata digunakan Indikator Kinerja Utama meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 903) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau di atas maka Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan meliputi:

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)
2. Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang)
3. Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan (Daya Tarik/ Kawasan / Destinasi)
4. Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)
5. Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (Sub Sektor)
6. Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (%)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Miliar Rupiah	2.387	2.626	5.171,75	5.326,9	4.876,24	6.301,87	5.171,75	5.326,9	
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	370.500	474.240	1.474.269	1.621.695	758.154	1.530.899	1.474.269	1.621.695	

3.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	1.988.600	2.426.092	1.722.943	1.964.155	817.282	1.511.354	1.722.943	1.964.155	
4.	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi	2	2	2	2	3	2	2	2	
5.	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	2	2	2	2	1,63	3,95	2	2	
6.	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	3	3	7	7	3	3	7	7	
7.	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu koordinasi dan kerja sama antara pusat dan daerah muncul sebagai konsekuensi dari implementasi otonomi daerah yang tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Pengaturan kewenangan ini menimbulkan arogansi daerah untuk menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya dan wilayah administratifnya masing-masing, sehingga mengakibatkan pengembangan kegiatan kepariwisataan antara Pusat dan Daerah kurang terkoordinasi dengan baik. Begitu pula koordinasi antara pemerintah dan swasta. Hal ini dapat memicu kecenderungan orientasi pembangunan yang hanya mengejar peningkatan PAD yang mendorong masing-masing daerah berkompetisi secara kurang sehat untuk menarik pasar wisatawan ke daerahnya dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak memberikan kenyamanan kunjungan wisatawan dan bahkan mengarah pada eksploitasi berlebihan

terhadap objek wisata yang berdampak pada penurunan daya dukung dan kualitas objek tersebut.

Selain itu, ancaman yang paling serius atas implementasi otonomi daerah adalah munculnya paradigma sektoral yang menggilas peran lintas sektoral pariwisata, yang selanjutnya berpengaruh besar terhadap pembangunan faktor pendukung pariwisata seperti aksesibilitas, amenitas, atraksi, dan promosi. Padahal, pembangunan kepariwisataan bersifat *borderless*, yang berarti pembangunan dan pengelolaannya berlangsung lintas batas administratif dan lintas sektor. Oleh karena itu, hendaknya setiap pemegang kewenangan otonom dan pemangku kepentingan pariwisata harus berpikir nasional (Indonesia) dan bertindak lokal (daerah). Dengan konsep ini, berarti para pemegang kewenangan daerah otonom tidak menutup diri bagi kebijakan pariwisata secara nasional untuk kepentingan kemajuan daerahnya.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan yang diharapkan mampu mengatasi masalah koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia dengan Perpres No. 64 tahun 2014, dan Perpres No. 63 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan. Dengan adanya peraturan ini, maka jelas sudah posisi sektor pariwisata sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan di Indonesia sehingga diharapkan tujuan dari pembangunan kepariwisataan dalam tercapai dan *multiplier effect* dari kegiatan pariwisata dapat menjadi lebih efektif.

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan di mana Dinas Pariwisata mengampu pada tujuan "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua", Pemerintah Daerah Kepulauan Riau juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 757 Tahun 2017 Tentang Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Provinsi Kepulauan Riau di mana Dinas Pariwisata ikut bertanggungjawab dalam penyusunan rencana aksi daerah sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Selain itu Dinas Pariwisata perlu mengenali peluang dan tantangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan pariwisata. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal - antara pusat dengan daerah, maupun horizontal - antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisataan:

❖ **Peluang (*opportunities*)**

- Letak Geostrategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara-Negara tetangga;
- Adanya kebijakan skala nasional dan internasional tentang pengembangan pariwisata terutama wisata bahari;
- Dijadikannya wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Kawasan Strategis Pengembangan Kepariwisataan Nasional;
- Telah ditetapkannya Batam-Bintan sebagai kawasan pengembangan nasional;
- Dukungan Kelembagaan Nasional pada pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau;
- Adanya kebijakan skala nasional tentang Pemberlakuan Kunjungan Bebas Visa;
- Berkembangnya usaha pariwisata dunia, Indonesia maupun di Kepulauan Riau yang begitu pesat dan menjanjikan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebelum adanya covid-19;

- Beraneka ragam potensi daya tarik wisata Kepulauan Riau baik alam, budaya maupun buatan yang khas/unik dapat berdaya saing dan daya banding yang tinggi dengan luar daerah Kepulauan Riau;
- Sarana dan prasarana kepariwisataan Kepulauan Riau serta pendukung/penunjangnya yang semakin memadai;
- Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau;
- Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

❖ **Tantangan (*threats*)**

- Berkembang pesatnya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di luar wilayah Kepulauan Riau sebagai pesaing/ kompetitor yang semakin tinggi;
- Pengelolaan aneka ragam potensi daya tarik wisata Kepulauan Riau baik alam, budaya, maupun buatan sebagai daya saing dan daya banding perlu ditingkatkan kualitasnya;
- Tampilan seni budaya sebagai daya tarik wisata di seluruh destinasi pariwisata Kepulauan Riau kualitas dan kuantitasnya perlu segera ditingkatkan;
- Kesadaran wisata, penerapan/pemahaman sapta pesona dan kesiapan seluruh stakeholder pariwisata serta masyarakat Kepulauan Riau belum maksimal;
- Sumber daya manusia kepariwisataan Kepulauan Riau kuantitas dan kualitasnya masih kurang;
- Perdagangan pasar bebas dalam negeri dan pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mengharuskan kepariwisataan Kepulauan Riau punya daya saing tinggi dan berstandar;
- Isu Keamanan yang bisa mempengaruhi citra pariwisata daerah;

- Meningkatnya persaingan antar destinasi pariwisata pada tingkat nasional dan regional;
- Bencana kabut asap yang sering melanda Kepulauan Riau khususnya pada musim kemarau;
- Nilai-nilai budaya lokal dapat tergerus oleh nilai-nilai budaya asing yang dengan bebas masuk ke negeri ini;
- Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

Meskipun perencanaan dan pengelolaan sektor kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau selama ini telah direncanakan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten/Kota, permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis pengembangan daya tarik wisata di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tetap muncul. Berikut ini isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan di Kepulauan Riau yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan adalah; belum optimalnya destinasi obyek wisata di Provinsi Kepulauan Riau; Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata, kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal, dan sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang masih belum optimal.
- 2) Pada Program Pemasaran Pariwisata isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan adalah; diperlukan insentif bagi pelaku industri pariwisata, diperlukan peningkatan promosi pariwisata serta tourism linkage networking antar lembaga dan antar kabupaten dan kota untuk menciptakan branding pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau, strategi komunikasi pemasaran wisata yang belum terpadu, sinergi kemitraan pemasaran wisata masih belum optimal, dan kegiatan promosi wisata masih belum maksimal.
- 3) Pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan

adalah; sumber daya manusia pariwisata yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas baik dari industri pariwisata maupun SDM Aparatur Pemerintah Daerah serta koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif.

- 4) 4. Pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan adalah; diperlukan pengembangan, pendampingan, dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif, diperlukan pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah wisata, diperlukan perlindungan hukum terhadap industri kreatif, sarana prasarana ekonomi kreatif belum optimal, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif, belum adanya standarisasi terhadap ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Isu strategis dan analisa kebutuhan yang berkembang saat ini menjadi pedoman dalam menyusun program, kegiatan, dan kegiatan serta anggaran yang akan menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2025 dapat dilihat **tabel 2.3** berikut;

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	2 Daya Tarik/Kawa san/Destin asi	8.593.449.883	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	2 Daya Tarik/Kawa san/Destin asi	8.593.449.883	
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	5 Daya Tarik	5.793.449.883	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	5 Daya Tarik	5.793.449.883	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Kabupaten Bintan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Lokasi	2.643.449.883	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Kabupaten Bintan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Lokasi	2.643.449.883	
1.2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7 Dokumen	150.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7 Dokumen	150.000.000	
1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Provinsi Kepri	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	1500 Orang	3.000.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Provinsi Kepri	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	1500 Orang	3.000.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	8 Kawasan Strategis	700.000.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	8 Kawasan Strategis	700.000.000	
2.1	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	600.000.000	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	600.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7 Laporan	100.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7 Laporan	100.000.000	
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	2 Destinasi	1.000.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	2 Destinasi	1.000.000.000	
3.1	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.000.000.000	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.000.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	10 Industri	1.100.000.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	10 Industri	1.100.000.000	
4.1	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Provinsi Kepri	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	500 Usaha	550.000.000	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Provinsi Kepri	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	500 Usaha	550.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Provinsi Kepri	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	50 Unit Usaha	550.000.000	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Provinsi Kepri	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	50 Unit Usaha	550.000.000	
II	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.621.695 Orang	11.163.914.810	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.621.695 Orang	11.163.914.810	
			Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	1.964.155 Orang				Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	1.964.155 Orang		

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dipromosikan	28,30%	11.163.914.810	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dipromosikan	28,30%	11.163.914.810	
1.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Dokumen	3.083.914.810	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Dokumen	3.083.914.810	
1.2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	380.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	380.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi Kepri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	18 Kegiatan	7.700.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi Kepri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	18 Kegiatan	7.700.000.000	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	7 Sub Sektor	4.800.541.682	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	7 Sub Sektor	4.800.541.682	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah dokumen Pelaku Usaha Kreatif yang dikembangkan dan disediakan sarana dan prasarannya	1 Dokumen	3.100.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah dokumen Pelaku Usaha Kreatif yang dikembangkan dan disediakan sarana dan prasarannya	1 Dokumen	3.100.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kabupaten Bintan, Kota Batam, KotaTanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3 Laporan	450.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kabupaten Bintan, Kota Batam, KotaTanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3 Laporan	450.000.000	
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Kabupaten Natuna	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Kabupaten Natuna	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	150.000.000	
1.3	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	2.500.000.000	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	2.500.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen	1.700.541.682	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen	1.700.541.682	
2.1	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kabupaten Bintan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	100.000.000	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kabupaten Bintan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	100.000.000	
2.2	Perlindungan Hasil Kreativitas	Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	100.000.000	Perlindungan Hasil Kreativitas	Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	100.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	180.541.682	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	180.541.682	
2.4	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen	100.000.000	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen	100.000.000	
2.5	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jakarta	Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi	270.000.000	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jakarta	Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi	270.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	150.000.000	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	150.000.000	
2.8	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Provinsi Kepri	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	100 Produk	300.000.000	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Provinsi Kepri	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	100 Produk	300.000.000	
2.9	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Provinsi Kepri	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	500.000.000	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Provinsi Kepri	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	500.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	2%	2.525.541.682	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	2%	2.525.541.682	
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	650 Orang	1.720.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	650 Orang	1.720.000.000	
1.1	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150 Orang	320.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150 Orang	320.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	100.000.000	
1.3	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Bintan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	50 Orang	100.000.000	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Bintan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	50 Orang	100.000.000	
1.4	Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	150 Orang	350.000.000	Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	150 Orang	350.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna Kota Batam, Kabupaten Lingga	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	200 Orang	450.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna Kota Batam, Kabupaten Lingga	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	200 Orang	450.000.000	
1.6	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bintan, Kota Batam	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang	200.000.000	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bintan, Kota Batam	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang	200.000.000	
1.7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	200.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	200.000.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	210 Orang	805.541.682	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	210 Orang	805.541.682	
2.1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	400.000.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	400.000.000	
2.2	Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	155.541.682	Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	155.541.682	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kota Batam, Kabuapten Bintan	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	100 Orang	250.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kota Batam, Kabupaten Bintan	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	100 Orang	250.000.000	
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	100%	14.547.118.452	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	100%	14.547.118.452	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	305.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	305.000.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	229.430.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	229.430.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	30.570.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	30.570.000	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	45.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	45.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	100%	10.306.652.163	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	100%	10.306.652.163	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	9.777.940.163	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	9.777.940.163	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	518.712.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	518.712.000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	243 Stel	309.825.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	243 Stel	309.825.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	309.825.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	309.825.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.231.764.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100&%	1.231.764.400	
4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	190.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	190.500.000	
4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	114.402.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	114.402.000	
4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	926.862.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	926.862.400	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.029.116.489	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.029.116.489	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99.200.000	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.925.416.489	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.925.416.489	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	100%	364.760.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	100%	364.760.400	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	139.934.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	139.934.000	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	174.036.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	174.036.400	
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	50.790.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	50.790.000	
TOTAL					41.630.566.509	TOTAL					41.630.566.509

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan/ sub kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/ Kota, masyarakat, asosiasi yang merupakan *stakeholder* bidang kepariwisataan sebagai mitra kerja dinas dalam mewujudkan tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau **"Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat"**.

Dokumen Rancangan Akhir RKPD Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah mengakomodir usulan dari kabupaten/kota, masyarakat, maupun dari stakeholder pariwisata lainnya.

Berikut usulan dari masyarakat dan usulan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota yang diterima, dapat dilihat pada **tabel 2.4** sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	Usulan Kota Tanjungpinang
		Kabupaten Bintan		1 Kegiatan	Usulan Kab. Bintan
		Kab. Karimun		1 Kegiatan	Usulan Kab. Karimun
		Kabupaten Karimun		1 Kegiatan	Usulan Masyarakat
2	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Usulan Masyarakat
		Kab. Bintan		1 Dokumen	Usulan Kab. Bintan
		Kabupaten Lingga		1 Dokumen	Usulan Kab. Lingga
3	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Kota Tanjungpinang	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	Usulan Kota Tanjungpinang

4	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Usulan Kota Tanjungpinang
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Kab. Bintan	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang	Usulan Kab. Bintan
		Kabupaten Lingga		50 Orang	Usulan Kab. Lingga
6	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Kabupaten Lingga	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	4 Lokasi	Usulan Kab. Lingga
		Kab. Karimun		1 Lokasi	Usulan Kab. Karimun
7	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Lingga	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	Usulan Kab. Lingga
8	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Karimun	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20 Orang	Usulan Kab. Karimun

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada pengembangan pariwisata terdapat pedoman yang menjadi acuan pengembangan pariwisata yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mengagendakan 7 (tujuh) Prioritas Nasional, yaitu;

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, tema pembangunan tahun 2025 yaitu: "Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan" dengan prioritas Pembangunan: Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Infrastruktur Wilayah, dan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

Keterkaitan antara Prioritas Dinas Pariwisata, Prioritas daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dengan visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional terlihat pada skema berikut ini.



Gambar 3.1 Skema Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yaitu “Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Sementara itu sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut;

1. Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata;
2. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata;
3. Terwujudnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel, dan
4. Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada **tabel 3.1** berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025
1.	Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku (Miliar Rupiah)			4.874,87	5.326,9
			Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	758.154	1.621.695
				Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang)	817.282	1.964.155
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan (Daya Tarik/ Kawasan/Destinasi)	3	2

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025
			Terwujudnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)	1,63	2
			Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (Sub Sektor)	3	7

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 dalam urusan pariwisata sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini diusulkan 5 (Lima) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) Sub Kegiatan yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

I. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

- 1.1. Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
- 1.2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
- 1.3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi

2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

- 2.1. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- 2.2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

- 3.1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi

4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 4.1. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah
- 4.2. Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)

II. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

- 1.1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
- 1.2. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 1.3. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri

III. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

- 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
- 1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula
- 1.3. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik

2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- 2.1. Pengembangan Sistem Pemasaran
- 2.2. Perlindungan Hasil Kreativitas
- 2.3. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- 2.4. Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
- 2.5. Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif
- 2.6. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
- 2.7. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
- 2.8. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

- 1.1. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- 1.2. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
- 1.3. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
- 1.4. Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah
- 1.5. Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
- 1.6. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- 1.7. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- 2.1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- 2.2. Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif
- 2.3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 4.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rencana Kerja Dinas Pariwisata tahun 2025 ini juga telah mengakomodir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana dalam Rencana Aksi Daerah, di mana Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau bertanggungjawab atas pencapaian target SDGs indikator daerah tahun 2025 di antaranya;

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebesar 1.621.695 orang, Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara sebesar 1.964.155 orang.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2025 ini juga telah mengakomodir pelaksanaan Program dan kegiatan pengarus utamaan gender yaitu; pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi), dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata, Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah, Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif).

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 pada dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dengan pagu indikatif Rp. 41.630.566.509,- dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disajikan pada **tabel 4.1** berikut;

Tabel 4.1. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					41.630.566.509				29.846.681.400
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi		2	8.593.449.883			2	8.014.275.729
3 26 02 1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	Daya Tarik		5	5.793.449.883			7	5.889.275.729
3.26.02.1.01.05	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	Kabupaten Bintan	2	2.643.449.883	PAD		4	1.789.275.729
3.26.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Laporan	Provinsi Kepri	7	150.000.000	PAD		7	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.02.1.01.08	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Provinsi Kepri	1500	3.000.000.000	PAD		1800	3.700.000.000
3 26 02 1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kawasan Strategis		8	700.000.000			8	650.000.000
3.26.02.1.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	Kabupaten Bintan dan KotaTanjungpinang	2	600.000.000	PAD		0	0
3.26.02.1.02.08	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	Provinsi Kepri	7	100.000.000	PAD		7	650.000.000
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Destinasi		2	1.000.000.000			2	0
3.26.02.1.03.09	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Dokumen	Provinsi Kepri	1	1.000.000.000	PAD		0	0
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang	Industri		10	1.100.000.000			10	1.475.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata								
3.26.02.1.04.06	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	Provinsi Kepri	500	550.000.000	PAD		500	975.000.000
3.26.02.1.04.09	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	Provinsi Kepri	50	550.000.000	PAD		50	500.000.000
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang		1.621.695	11.163.914.810			1.783.864	4.067.706.520
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang		1.964.155				2.239.136	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dipromosikan	%		28,3	11.163.914.810			32,1	4.067.706.520

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Provinsi Kepri	15	3.083.914.810	PAD		17	1.817.706.520
3.26.03.1.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	Provinsi Kepri	1	380.000.000	PAD		1	450.000.000
3.26.03.1.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	Provinsi Kepri	18	7.700.000.000	PAD		16	1.800.000.000
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor		7	4.800.541.682			7	1.930.525.198
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah dokumen Pelaku Usaha Kreatif yang dikembangkan dan disediakan sarana dan prasarananya	Dokumen		1	3.100.000.000			1	450.000.000
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang	Laporan	KotaTanjungpinang, Kabupaten	3	450.000.000	PAD		1	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		Bintan, Kota Batam						
3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	Kabupaten Natuna	1	150.000.000	PAD		1	150.000.000
3.26.04.1.01.06	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	KotaTanjungpinang dan Kabupaten Bintan	1	2.500.000.000	PAD		1	150.000.000
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen		1	1.700.541.682			1	1.480.525.198
3.26.04.1.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	Kabupaten Bintan	1	100.000.000	PAD		1	100.000.000
3.26.04.1.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	KotaTanjungpinang dan Kabupaten Bintan	1	100.000.000	PAD		1	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Provinsi Kepri	1	180.541.682	PAD		1	210.525.198
3.26.04.1.02.11	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	Dokumen	KotaTanjungpinang	1	100.000.000	PAD		1	100.000.000
3.26.04.1.02.14	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Promosi	Jakarta	1	270.000.000	PAD		1	270.000.000
3.26.04.1.02.15	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	Kota Batam, KotaTanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun	1	150.000.000	PAD		1	150.000.000
3.26.04.1.02.18	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	Provinsi Kepri	100	300.000.000	Dinas Pariwisata		100	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.04.1.02.19	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	Provinsi Kepri	1	500.000.000	Dinas Pariwisata		1	250.000.000
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%		2	2.525.541.682			2	2.180.525.198
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		650	1.720.000.000			600	1.575.000.000
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	Kabupaten Lingga, KotaTanjung pinang dan Kabupaten Bintan	150	320.000.000	Dinas Pariwisata		200	400.000.000
3.26.05.1.01.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	KotaTanjung pinang	1	100.000.000	Dinas Pariwisata		1	100.000.000
3.26.05.1.01.14	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Orang	Kabupaten Bintan	50	100.000.000	Dinas Pariwisata		50	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		untuk pengembangan Pariwisata								
3.26.05.1.01.15	Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	Orang	KotaTanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan	150	350.000.000	Dinas Pariwisata		50	125.000.000
3.26.05.1.01.16	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna	200	450.000.000	Dinas Pariwisata		200	450.000.000
3.26.05.1.01.17	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Kota Batam, Kabupaten Bintan	100	200.000.000	Dinas Pariwisata		100	200.000.000
3.26.05.1.01.18	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	Provinsi Kepri	1	200.000.000	Dinas Pariwisata		1	200.000.000
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang	Orang		210	805.541.682			160	605.525.198

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dikembangkan kapasitasnya								
3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Kota Tanjungpinang, Kota Batam	100	400.000.000	Dinas Pariwisata		50	200.000.000
3.26.05.1.02.05	Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	Kota Batam	10	155.541.682	Dinas Pariwisata		10	155.525.198
3.26.05.1.02.07	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	Kota Batam, Kabupaten Bintan	100	250.000.000	Dinas Pariwisata		100	250.000.000
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%		100	14.547.118.452			100	13.653.648.755
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah	Dokumen		3	305.000.000			3	305.000.000
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Provinsi Kepri	5	229.430.000	Dinas Pariwisata		5	229.430.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Provinsi Kepri	5	30.570.000	Dinas Pariwisata		5	30.570.000
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Provinsi Kepri	1	45.000.000	Dinas Pariwisata		1	45.000.000
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	%		100	10.306.652.163			100	10.749.281.627
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	KotaTanjungpinang	45	9.777.940.163	Dinas Pariwisata		45	10.220.569.627
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	KotaTanjungpinang	1	518.712.000	Dinas Pariwisata		1	518.712.000
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	KotaTanjungpinang	1	10.000.000	Dinas Pariwisata		1	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Stel		243	309.825.000			0	0
3.26.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	KotaTanjungpinang	3	309.825.000	Dinas Pariwisata		0	0
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	1.231.764.400			100	874.690.239
3.26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	KotaTanjungpinang	3	190.500.000	Dinas Pariwisata		3	150.500.000
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	KotaTanjungpinang	2	114.402.000	Dinas Pariwisata		2	114.402.000
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Provinsi Kepri	12	926.862.400	Dinas Pariwisata		12	609.788.239
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	2.029.116.489			100	1.389.916.489
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	KotaTanjungpinang	1	4.500.000	Dinas Pariwisata		1	4.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	KotaTanjungpinang, Kota Batam	12	99.200.000	Dinas Pariwisata		12	60.000.000
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	KotaTanjungpinang, Kota Batam	12	1.925.416.489	Dinas Pariwisata		12	1.325.416.489
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	%		100	364.760.400			100	334.760.400
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	KotaTanjungpinang, Kota Batam	2	139.934.000	Dinas Pariwisata		2	109.934.000
3.26.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	KotaTanjungpinang	6	174.036.400	Dinas Pariwisata		6	174.036.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	KotaTanjung pinang	56	50.790.000	Dinas Pariwisata		56	50.790.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Isi dari Rancangan Awal Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau di dalam Rencana Kerja Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan urusan pariwisata. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam renstra 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah - langkah sebagai berikut;

- a. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu.
- b. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 memfokuskan pada pencapaian target dari indikator kinerja pelayanan Dinas Pariwisata.
- c. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau maupun sumber pendanaan lainnya.
- d. Di dalam proses penyusunannya, Renja harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD, dan Renstra Dinas Pariwisata)
- e. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* Pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan - kegiatan pembangunan dan pengembangan di sektor pariwisata Kepulauan Riau, dengan meliputi beberapa aspek unggulan seperti pengembangan destinasi wisata, pengembangan pemasaran wisata, pengembangan industri pariwisata, pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat".